KEBIJAKAN POLITIK AYUB KHAN DI PAKISTAN 1958-1969 M

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

NUR ASIAH
01120574

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

FAKULTAS ADAB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

1427 H
2006 M

Dr. M. Abdul Karim, M.A., M.A.
Dosen Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Adab

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Asiah

NIM/Fakultas : 01120574/ Adab

Judul Skripsi : Kebijakan Politik Ayub Khan di Pakistan 1958-1969 M

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. Untuk itu saya berharap agar skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat disidangkan dalam siding munaqosah.

Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1427 H
24 September 2006 M

Pembimbing

Dr. M. Abdul Karim, M. A., M.A.
NIP : 150290391

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEBIJAKAN POLITIK AYUB KHAN DI PAKISTAN 1958-1969 M

Diajukan oleh :

1. N a m a : **NUR ASIAH**
2. N I M : 01120574
3. Program : Sarjana Strata 1
4. Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Telah dimunaqasyahkan pada hari: **Rabu** tanggal **11 Oktober 2006** dengan nilai B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
NIP. 150187004

Sekretaris Sidang

Maharsi, M.Hum.
NIP. 150299965

Pembimbing /merangkap penguji,

Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A., M.A.
NIP.150290391

Penguji I

Drs. H. Maman A. Malik Sy., M.S.
NIP. 150197351

Penguji II

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
NIP. 150267220

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 November 2006

Dekan,

Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.
NIP. 150178235

MOTTO

Hidup laksana air terus mengalir, namun mempunyai tujuan.
Ketika saluran tersumbat berusaha mencari celah,
mengumpulkan kekutan agar muncul tenaga baru,
mengalir dan bertujuan...[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Dikutip dari acara Radio Delta "Indonesia Siesta" segmen *To Days Word*, pada tanggal 20 Juli 2006

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Welas Asih
Sepenuhnya Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- *Untuk Abah dan Ibu*
  Terimakasih tak berujung, untuk do'a yang tak terputus.
  Hanya dengan ridlamu, semuanya terasa lebih mudah

- *Untuk Aang penulis (Wahid, Aby Yasir, Ang Agan,*
  dan Abang Dhowi), Ipar penulis (Fatimah,dan
  Umy Ikah Tasbihah), serta adik penulis Zijqi"Alex"Faiz
  Kalian adalah saudara terhebat dan kekayaan terindah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لااله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله.

اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه و من اتبعه باحسا ن الى يوم الد ين, اما بعد.

Demi Allah yang Maha Kuasa puji dan syukur hanyalah bagi-Nya untuk kita panjatkan, shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Tidak ada cita yang paling mulia selain segenggam harapan semoga segala yang telah diperbuat selama ini berkenan di sisi-Nya menjadi untaian mutiara yang tak mengenal jeda dan penuh dengan nilai ibadah. Kesucian niat dan kemurnian keyakinan, semoga menjadi jembatan emas penghantar dalam menuju genggaman keridlaan-Nya.

Sebuah tugas mulia telah diselesaikan, penelitian telah berbuah dalam bentuk skripsi semua dilakukan dengan bersandar pada pertolongan-Nya serta curahan kemampuan yang telah penulis buktikan, tidak berlebihan kalau pada kesempatan ini penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga beserta stafnya
2. Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak. M. Abdul Karim, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya dengan ikhlas dan sabar untuk penulis
4. Bapak. Dudung Abdurrahman selaku penasehat akademik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Para Dosen di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, terimakasih telah berbagi ilmu dengan penulis selama mengikuti studi, dan segenap pegawai TU yang telah banyak memberikan bantuannya.
6. Pihak UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Yayasan Hatta, dan Perpustakaan Kolese St. Ignatius, atas bantuannya dalam menyediakan data-data guna terselesainya skripsi ini
7. Keluarga penulis, sebuah pengharapan ridla, yakni Abah, Ibu, dengan kasih sayang, do'a penuh keikhlasan, yang telah membesarkan dan membimbing agar putrinya menjadi manusia yang baik. Seluruh kelurga penulis Ang Wahid-Fatimah, Aby Zibby-Umy Ikah, Ang Agan, Juragan Anom, dan adikku Zijqi"Alex"Faiz, harapan, rasa sayang, dan kecemasan telah menjadi semangat buat Enung untuk melakukan yang terbaik.
8. Semua warna-warni yang memberi pengalaman hidup, Mpok Maya Herlina, terimakasih untuk semua bantuannya, walau diakhir namun sangat berharga sekaligus membuka bahwa hanya pada keluarga tempat yang paling hangat untuk berbagi. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberi semangat Dinda Ewin, Lisa, Syahfrud, Iyis, Mas Aep, Ida, Kiki, Kang Aziz, dan Eni, semoga kita bisa menjaga silaturrahim ini.
9. Teman-teman di x-kost kita Gendeng, dan di Kauman, sulit sekali untuk menuliskan beratus-ratus hari yang penuh keakraban bersama kalian. Saudara-saudaraku di IPMKS khususnya Marhaeni, Didin, Rahmat, Ika (alm), dan A'Udin, terimakasih untuk semua bantuannya. Untuk yang Engkau kehendaki mencintaiku, semoga bersemayam dalam rahasia-Mu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hanya do'a yang mampu penulis sampaikan, semoga segala bantuannya menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT. Tercurah dari kesadaran dilubuk hati yang dalam, kekurangan dan kekeliruan kemungkinan terjadi dalam penulisan skripsi ini, namun semoga itu semua tidak mengurangi terhadap nilai sebuah makna perjuangan. Kebaikan dan kemaslahatan yang senantiasa diharapkan, semoga semua itu menjadi kenyataan bagi kita dalam melanjutkan sisi hidup di dunia ini. *Amiin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 24 September 2006

Nur Asiah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Landasan Teori 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II. PAKISTAN: GAMBARAN SOSIAL-POLITIK NEGARA BARU
A. Latar Belakang Kemerdekaan Pakistan 19
B. Partisipasi Masyarakat dalam Politik 22
C. Pemerintahan Parlementer di Pakistan 27
D. Konstitusi 1956 34
E. Hukum Darurat Perang di Bawah Rezim Iskandar Mirza 37

BAB III. AYUB KHAN: PRESIDEN PAKISTAN
A. Biografi Ayub Khan 42
B. Tindakan Kudeta Militer Terhadap Iskandar Mirza 45
C. Kemunduran Kekuasaan 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN POLITIK AYUB KHAN

A. Hukum Darurat Perang 1958-1962 51

B. Pelaksanaan Basis Demokrasi 59

C. Konstitusi 1962 65

D. Perjanjian Tashkent 72

E. Hasil dari Kebijakan Politik Ayub Khan 76

F. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik Ayub Khan.... 79

1. Demonstrasi di Pakistan Barat 81

2. Demonstrasi di Pakistan Timur 83

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakistan[1] menjadi sebuah negara merdeka dengan keberhasilan teori dua bangsa (*Two Nation Theory*)[2] yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Jinnah (1876-1948). Ide tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan tokoh-tokoh Muslim karena hak-hak minoritas Muslim dalam sebuah masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu. Selain itu, guna memenuhi keinginan masyarakat beragama Islam[3] (sebagian besar tersebar di wilayah Punjab dan Sind) yang menginginkan suatu negara tersendiri, maka lahirlah Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947.

Sejak awal berdirinya Pakistan sudah menghadapi permasalahan. Dilihat dari letak geografisnya, wilayah Pakistan terpisah menjadi dua yaitu Pakistan Barat dan Timur (sekarang Pakistan Timur menjadi Negara Bangladesh); kedua

---

[1] Nama Pakistan merupakan sumbangan dari beberapa mahasiswa Muslim India di Cambridge University. Mereka memberi nama Pakistan untuk negara yang diusulkan Iqbal (1875-1938). Pakistan dirumuskan dari nama-nama propinsi yang berpenduduk mayoritas agama Islam (Muslim) di daerah Barat Laut India: Punjab, Afghan, Kashmir, Sind, dan Baluchistan. Nama ini juga berarti tempat yang bersih suci. Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 57. Diungkapkan Choudhury Rahmat Ali bahwa "Tanah orang-orang Pakistan_ adalah orang yang rohaninya suci dan bersih". Edward Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, terj, Enna Hadi dan Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 184.

[2] Teori dua bangsa (*Two Nation Theory*) menyatakan bahwa India merupakan negara yang didiami oleh banyak ras yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, baik agama, tradisi maupun cara hidup. Hindu dan Islam merupakan dua agama besar, dan perbedaan di antara keduanya tidak hanya pada agama tetapi juga hukum dan kebudayaan mereka, maka menurut Muhammad Ali Jinnah kaum Muslim India adalah satu yang berbeda dari kaum Hindu India. Sebagai satu bangsa maka kaum Muslim India berhak menentukan nasibnya sendiri. Aziz Ahmad. *Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964* (London: Oxford University Press, 1967), hlm 165-166. dan Aziz, Ahmad dan G. E. Von Grunebaum, *Muslim Self-Statement in India and Pakistan 1857-1968* (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), hlm. 153-155.

[3] Muhaimin, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), hlm. 46-47.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wilayah tersebut dipisahkan oleh India sejauh 1200 mil.[4] Masalah-masalah yang dihadapi negara baru ini terus bertambah, karena setelah berabad-abad di anak benua ini hanya terdapat satu pusat pemerintahan dan bahkan dalam hal administrasi praktis terdapat kesulitan-kesulitan besar. Banyak pejabat-pejabat India sebelum kemerdekaan bertugas di daerah-daerah Pakistan, namun setelah kedua negara mendapat kemerdekaan pejabat India yang beragama Hindu tersebut lebih memilih untuk mengabdi pada pemerintahan India.[5] Kesulitan politik pun muncul karena kurangnya komunikasi pusat dan daerah, juga belum terbentuknya pemerintahan yang terbina. Keadaan inilah yang dihadapi Muhammad Ali Jinnah pada awal pemerintahannya sampai ia wafat pada 11 September 1948.[6] Sebagai pengganti Jinnah, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Liaquat Ali Khan kemudian menunjuk Khawaza Najimuddin untuk segera menggantikan Jinnah sebagai Gubernur Jendral.[7]

Pada masa kepemimpinan Khawaza Najimuddin ini persoalan negara yang sangat krusial adalah masalah konstitusi negara yang belum tersusun. Dokumen pertamanya tertuang dalam *Objective Resolution*,[8] yang merupakan hasil perundingan antara Liaquat Ali Khan dengan Liga Muslim pada tahun 1949.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Ali Sodiqin, "Peradaban Islam di Asia Selatan dan Imperialisme Barat" dalam Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.226.

[5] Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 151.

[6] *Ibid.*, hlm. 152.

[7] "Khawaza Najimuddin Become Governor General 1948-1951" dalam http:// www. Story of pakistan. com/articletext.asp?artid=P053.

[8] *Objetive Resolution* ini kemudian dijadikan sebagai mukadimah dalam konstitusi 1956.

[9] Munir D. Mahmud, "Pakistan: The Dream of Islamic State", dalam Carlo Caldarola *Religion and Societies Asia in the Midle East* (Delhi: Moutan Publisher, 1982), hlm. 164 dan M. L.

Garis-garis besar resolusi tersebut menyatakan bahwa "kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kekuasaannya kepada Kepala Negara Pakistan melalui rakyat untuk dilaksanakan sesuai batas-batas yang telah ditentukan-Nya". Dalam resolusi juga disebutkan bahwa umat Islam berhak mengatur kehidupan individu maupun golongannya sesuai dengan syariat Islam, non-Muslim diberi kebebasan untuk memeluk dan mengamalkan agama serta mengembangkan kebudayaan mereka.

Atas nasehat dari Liaquat Ali Khan, pada tahun 1949 Khawaza Najimuddin kemudian membentuk *Basic Principles Committee* (Komisi Pembuat Undang-undang), namun karena terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan model konstitusi, maka akhirnya badan ini dibubarkan pada tahun 1952. Di tengah-tengah perdebatan mengenai permasalahan konstitusi, Liaqiat Ali Khan tewas terbunuh pada 16 tanggal Oktober 1951.[10]

Dari sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947 sampai tahun 1956 konstitusi Pakistan baru berhasil disusun pada tahun 1956 dengan rentang waktu sembilan tahun di bawah pimpinan Perdana Menteri Chowdhury Muhammad Ali. Di tahun yang sama, Presiden terpilih di bawah konstitusi 1956 adalah Jendral Iskandar Mirza, orang yang menyatakan secara jelas bahwa menurut pandangannya agama dan politik harus dan sudah semestinya dipisahkan, selain itu ia juga dikenal berorientasi sekuler, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shahani, "Religion and Government A Pakistani Experince", dalam *al-Munshir*. Vol. 44. No. 1 tahun 2002, hlm. 19.

[10] Latar belakang mengenai terbunuhnya Liaquat Ali Khan masih kuran jelas. Dari data yang diperoleh bahwa Liaquat dibunuh oleh seorang pengungsi politik asal Afghan. Keith Callard, "Pakistan", dalam G. Mc Turhan Kahim, *Major Government of Asia* (Itacha: Cornell University Press, 1961), hlm. 395. Diketahui pula identitas pembunuh tersebut bernama Saad Akbar, tapi mengenai siapa di balik pembunuhan tersebut tidak diketahui. "Liaquat Ali Khan Become Prime Minister 1947-1951" dalam http:// www. storyof pakistan. com/articletext.asp?artid=A134.

oleh Mirza menimbulkan anarki politik. Tidak mengherankan jika beberapa tahun kemudian tepatnya 7 Oktober 1958_ setelah anarki politik, seperti menghapus badan-badan legislatif, membubarkan partai-partai politik, memberlakukan hukum darurat perang, dan menangguhkan Konstitusi 1956. Beberapa minggu kemudian masih pada bulan Oktober 1958 Field Marshal Muhammad Ayub Khan, sebagai pelaksana dari hukum darurat perang segera melakukan kudeta militer terhadap Mirza, karena ia menganggap bahwa kekacauan politik yang terjadi adalah akibat dari tindakan Iskandar Mirza yang anarkis.[11]

Setelah kudeta militer terhadap Iskandar Mirza, Ayub Khan pun segera tampil untuk menggantikan Mirza. Sebagai penguasa, dia segera memikirkan beberapa hal yang kemudian dituangkan dalam kebijakan politiknya. Menurut penulis kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Ayub Khan ini sangat unik untuk dikaji mengingat kebijakan yang diterapkannya berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Misalnya saja dalam hal sistem pemerintahan yang digunakan di Pakistan, dalam hal ini Ayub Khan menolak pelaksanaan demokrasi parlementer model *West Minister*[12] yang digunakan Pakistan sejak kemerdekaan, alasannya karena dia menganggap bahwa sistem tersebut tidak tepat diterapkan dalam konteks sosial-politik Pakistan, sebagai gantinya dia mendukung sistem pemerintahan *basic democracy* atau demokrasi terpimpin.[13]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Amal, *Islam,* hlm. 72.

[12] *West Minister* diartikan sebagai pemerintahan dengan model seperti parlemen Inggris. Haksa Wirasutisna dan Tatang Sastrawiria, *Ensiklopedia Politik* (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kem. P. & K, 1955), hlm. 325.

[13] Jhon L. Esposito, "Pakistan: Republik Islam Beraneka Wajah", dalam Jhon O. Voll (ed) *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, terj, Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 135.

Kebijakan lainnya adalah mengenai konstitusi negara yang sempat ditangguhkan oleh pemerinthana Iskandar Mirza. Pada masa kepemimpinan Ayub Khan ini konstitusi tersebut kembali disahkan, namun dia melakukan sedikit perubahan di dalamnya, yang ternyata menimbulkan tekanan umum dari kalangan ulama sampai akhirnya konstitusi pun kembali diamandemen pada 1963.[14] Tahun 1965 ketika peperangan antara India dan Pakistan kembali mencuat karena masalah perbatasan, Ayub Khan segera bertindak dengan melakukan politik Luar Negerinya guna menciptakan kedamaian di antara kedua negara tersebut. Konflik ini kemudian diakhiri dengan suatu perjanjian damai di antara keduanya, yang ditandatangani di kota Tashkent, Uni soviet, pengambilan tempat di kota ini karena kota tersebut dianggap netral terhadap masalah antara Pakistan dan India sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan masalah baru.

Setelah peperangan tersebut keadaan ekonomi Pakistan semakin memburuk ketimpangan sosial-ekonomi antara Pakistan Barat dan Timur makin jelas terlihat, Pakistan tidak hanya mengalami kerugian material tapi juga non-material yang jumlahnya tidak sedikit. Semua bantuan dan pinjaman yang datang dari luar negeri dikonsentrasikan untuk pembangunan di Pakistan Barat, hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa kecewa bagi penduduk yang berada di Pakistan Timur. Rasa kecewa tersebut kemudian makin tumbuh dan berujung pada sebuah gerakan di Pakistan Timur dengan nama Nasionalisme Banggali di bawah pergerakan Liga Awami, yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman. Tuntutan dari gerakan Nasionalisme ini adalah menginginkan suatu otonomi yang lebih luas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Mortimer, *Islam*, hlm. 197.

bagi Pakistan Timur, dan kemudian disusul dengan program tuntutannya yang dikenal dengan *six point*.[15]

Ternyata bukan saja di Pakistan Timur, di Pakistan Barat pun ikut menampakan rasa kecewa terhadap pemerintahan Ayub Khan. Dasar dari kekecewaan ini karena mereka tidak menerima tindakan Ayub Khan atas perjanjian Tashkent yang telah dilakukannya. Gerakan yang muncul di Pakistan Barat ini dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (mantan menteri luar negeri Pakistan yang diberhentikan oleh Ayub Khan) dengan sosial demokrasi-nya. Gerakan Bhutto ini kemudian diwujudkan dengan membentuk sebuah partai yang bernama *Pakistan People's Party*.[16]

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh Ayub Khan dalam pemerintahannya di Pakistan 1958-1969 M. Secara temporal masalah- masalah yang diteliti menjangkau rentang waktu antara tahun 1958-1969 M. Tahun 1958 merupakan awal kepemimpinan Ayub Khan di Pakistan dan merupakan awal baginya dalam menerapkan kebijakan politiknya, sedangkan tahun 1969 adalah akhir dari kepemimpinannya sebagai Presiden, karena pengunduran dirinya.

Dengan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, di antara rumusan tersebut adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh* (Dhaka: Ali Publications, 1980), hlm. 613.

[16] "Tashkent Declaration 1966" dalam http// www.Encarte.msn.com/ encyclopedia/ Pakistan. Html.

1. bentuk kebijakan politik seperti apa yang diterapkan Ayub Khan saat dia berkuasa di Pakistan;
2. bagaimana respon masyarakat Pakistan dalam menyikapi kebijakan politik Ayub Khan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain:

1. menggambarkan secara cermat dan terperinci mengenai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Ayub Khan.
2. untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan politik yang diterapkan Ayub Khan di Pakistan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang sejarah Pakistan khususnya masa pemerintahan Ayub Khan serta kebijakan politik yang diterapkannya. Selain itu dengan harapan dapat berguna bagi para mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada khususnya dan peminat sejarah pada umumnya, yakni sebagai penambah wawasan mengenai pemerintahan Republik Islam Pakistan khususnya pada era Ayub Khan, serta menambah literatur di perpustakaan yang tentunya berkaitan dengan sejarah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, judul maupun mengenai apa yang penulis bahas dalam skripsi ini belum ada yang mengkajinya. Untuk mendukung penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak dapat lepas dari apa yang sudah pernah ditulis para peneliti atau para ilmuwan yang sekiranya karya mereka ada sedikit hubungannya dengan skripsi yang penulis susun.

Ada beberapa literatur yang dapat mendukung dan memperlancar penelitian ini antara lain, buku berjudul *Pakistan: Emerging Democracy*, hasil karya Robert D. Campbell, diterbitkan oleh D. Van Nostrand, INC di New Jersey, tahun 1963. Buku kecil dengan jumlah halaman 144 ini memberikan uraian secara singkat mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan politik di Pakistan, sejak munculnya sebagai negara baru sampai rentang waktu tahun 1963. Uraian pada setiap babnya tidak hanya bertumpu pada pemaparan mengenai masalah politik di Pakistan, tapi menyinggung pula persoalan hukum dalam pemerintahan Pakistan yang sepenuhnya telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, selain masalah hukum dibahas pula tentang aktivitas ekonomi dan bagaimana Pakistan mengatur aktivitas tersebut dalam dunia international. Pada bagian empat dalam buku ini, terdapat pemaparan tentang pembentukan konstitusi yang akhirnya sampai pada Konstitusi 1962, tetapi pembahasannya hanya sampai pada pembentukan Komisi Konstitusi, yaitu sebuah Badan Komisi yang dibentuk sebagai modal awal untuk mencari kegagalan dalam pemerintahan Parlementer, yang pernah diterapkan sebelum kepemimpinan Ayub Khan. Pada bagian lainnya diuraikan pula mengenai *basic democracy* Ayub Khan di bawah judul *"Control Over Political Participation"*,[17] pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai susunan lengkap sistem pemerintahan model *basic democracy*, namun dalam pembahasannya tidak terdapat penjelasan secara khusus mengenai pengaruh dari penerapan sistem tersebut.

Buku yang kedua adalah tulisan dari Ayesha Jalal, berjudul *The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of Defence,* diterbitkan

---

[17] Robert D. Campbell, *Pakistan: Emerging Democracy* (New Jersey: D. Van Nostrand, INC, 1963).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di Cambrdige: Cambridge University Press, 1990. Buku yang mempunyai ketebalan 362 halaman ini disajikan dalam tujuh bagian. Bagian pertamanya dijelaskan mengenai tuntutan Muslim India (yang banyak menempati Daerah Punjab dan Sind) yang menginginkan untuk dibentuknya negara tersendiri bagi golongan Muslim, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang pembagian aset-aset menjelang pemisahan antara India dan Pakistan. Walaupun pembahasannya banyak mengupas tentang ekonomi Pakistan di bawah hukum darurat perang, namun dijelaskan pula pada bagian keenamnya tentang keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan pemerintahan Pakistan dengan menggunakan Islam sebagai ideologi bangsa. Pada bagian terakhirnya kemudian diuraikan tentang pelaksanaan hukum darurat perang tahun 1958, lebih jelasnya di saat pemerintahan Ayub Khan mulai berkusa,[18] tetapi, karena buku ini lebih menekankan pada masalah ekonomi Pakistan, maka dalam uraiannya lebih ditekankan pada pembahasan tentang kondisi perekonomian negara di bawah hukum darurat perang yang diberlakukan oleh penguasa Pakistan.

Buku yang terakhir yaitu karya dari K. Ali dengan judul *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, diterbitkan oleh Ali Publication, Dhaka, tahun 1980. dalam pembahasannya buku ini menjelaskan secara rinci mengenai sejarah yang terjadi di India, Pakistan, dan Bangladesh sejak pra-klasik, pertengahan, sampai modern. Untuk pemaparan tentang sejarah Pakistan sendiri disajikan dalam bagian XIII dengan penjelasan mengenai kondisi Muslim di India, tokoh-tokoh Muslim, dan beberapa pergerakannya sampai tuntutan dari golongan Muslim (Liga Muslim) untuk dibentuknya negara sendiri bagi Muslim india. Pada bagian XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of Defence* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

nya diuraikan tentang keadaan Pakistan setelah kemerdekaan tahun 1947 sampai tahun 1970. Untuk uraian tentang pemerintahan Ayub Khan sendiri diawali dengan kudeta militer terhadap Presiden Iskandar Mirza sampai program *six point* yang dilontarkan oleh Sheikh Mujibur Rahman untuk menuntut otonomi sendiri bagi Pakistan di Pakistan Timur. Selain itu, dalam pembahasan terakhirnya diuraikan tentang alasan-alasan perlawanan terhadap rezim Ayub Khan dan beberapa tanggapan mengenai kebijakan Ayub Khan yang dianggap diktator.[19] Walaupun memaparkan tentang kondisi Pakistan di masa Ayub Khan, namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai kebijakan politiknya, dalam buku K. Ali ini kurang menjelaskan mengenai sistem pemerintahan basis demokrasi begitupun susunan yang ada didalamnya, selain itu buku ini pun tidak menjelaskan alasan-alasan tentang diberlakukannya hukum darurat perang tahun 1958-1962 diawal Ayub Khan memimpin Negara Pakistan.

Selain buku-buku di atas, perlu disebutkan pula tulisan-tulisan ilmiah di berbagai jurnal, baik itu berbentuk fisik maupun dari dunia maya (Internet) yang membahas tentang kebijakan politik Ayub Khan, salah satunya adalah tulisan yang dimuat dalam http://www.storyofpakistan.com. Situs ini merupakan situs yang banyak mengupas tentang sejarah Pakistan dari sejak datangnya Islam di wilayah Sind sampai zaman setelah kemerdekaan dan lepas dari India. Tulisan mengenai Ayub Khan sendiri dituangkan dalam urain-urain singkat, yang dimulai sejak kudeta militer terhadap Iskandar Mirza sampai perjanjian damai di Tashkent, karena perang antara India dan Pakistan dalam persoalan Kashmir.[20] Akan tetapi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] K. Ali, *History of India. Pakistan, and Bangladesh* (Dhaka: Ali Publication, 1980).

[20] http://www.storyof pakistan.com.

dalam artikel ini tidak semua kebijakan politik Ayub Khan dijelaskan secara gamblang.

Selanjutnya layaknya sebuah penelitian, skripsi ini merangkai dan mengolah semua data yang telah diperoleh untuk kemudian menghasilkan sebuah pemaparan yang lengkap tentang kebijakan politik Ayub Khan di saat dia memegang kepemimpinannya di Pakistan.

E. Landasan Teori

Penelitian sejarah ini menjelaskan berbagai hal tentang kebijakan politik di Pakistan pada masa Ayub Khan, baik mengenai asal usul dan mengapa kebijakan tersebut berlangsung serta bentuk-bentuk kebijakan dan pengaruhnya. Politik sebagai pola distribusi kekuasaan jelas dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya,[21] dan setiap kebijakan politik yang diambil oleh seorang penguasa merupakan bagian dari keputusan politik. Ada pun ciri khas dari keputusan politik adalah suatu keputusan yang keluar dari proses politik yang bersifat mengikat, dan dimaksudkan untuk kebaikan masyaraka umum. Dengan demikian, keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyaraka umum.[22]

Setiap kebijakan dalam pemerintahan pada dasarnya ditentukan oleh individu pemimpinnya, maka pendekatan *behavioral* (pendekatan tentang perilaku) akan menjawab bahwa perilaku individulah yang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 149.

[22] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakatra: Gramedia, 1992), hlm. 19.

merupakan perilaku individu yang berpola tertentu, karena di dalam suatu lembaga terdapat sejumlah individu yang membuat keputusan dan melakukan tindakan. Oleh karena itu untuk menjelaskan mengenai kebijakan suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan kebijakan atau lembaganya melainkan individu yang secara aktual mengendalikan lembaga tersebut.[23] Perilaku individu atau perilaku pelaku sejarah dalam melakukan kegiatannya bisa juga disebut sebagai perilaku politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik ini dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Dalam penelitian mengenai kebijakn politik Ayub Khan di Pakistan ini penulis lebih condong untuk menggunakan analisis individu aktor politik, dimana menurut model ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor. *Pertama*, lingkungan sosial-politik tak langsung, seperti sistem politik, ekonomi, budaya, dan media massa. *Kedua*, lingkungan sosial-politik langsung, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, dan *keempat*, faktor lingkungan sosial-politik tak langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan, seperti cuaca, keadaan ruang (negara), adanya ancaman, tekanan dari kelompok, dan bisa juga dari keluarga.[24] Pendekatan *behavioral* ini adalah pendekatan yang tidak hanya tertuju pada kejadian, akan tetapi pada pelaku sejarah dan situasi rill bagaimana pelaku sejarah menafsirkan situasi yang dihadapi, sehingga dari penafsiran tersebut muncul tindakan yang menimbulkan suatu perubahan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] *Ibid.*, hlm. 131.

[24] *Ibid.*, hlm. 132-133.

selanjutnya timbul konsekuensi dari tindakannya.[24] Dalam hal ini, Ayub Khan menafsirkan bahwa kekacaun politik yang terjadi di Pakistan tidak hanya diakibatkan oleh tindakan penguasa sebelumnya (Iskandar Mirza), tapi juga karena tidak cocoknya sistem pemerintahan yang diterapkan di Pakistan. Untuk meredamkan kekacauan dalam negeri, Ayub Khan pun segera menerapkan kebijakan politiknya. Tapi dia pun harus menerima konsekuensi dari usahanya tersebut dengan munculnya respon yang kurang baik berupa demonstrasi dari masyarakat dalam menanggapi kebijakan politiknya.

Ketidakstabilan politik yang terjadi pada saat Ayub Khan memulai kepemimpinannya, telah menjadi tantangan baginya, yang akhirnya memunculkan suatu reaksi atau tanggapan dari Ayub Khan dalam bentuk kebijakan politik. Melihat fenomena kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Ayub Khan di Pakistan, maka untuk mendukung pendekatan di atas penulis menggunakan teori *Challenge and Response*. Teori ini menggambarkan tentang hubungan sebab akibat karena ditimbulkan dari suatu peristiwa. Langkah yang diambil oleh satu atau bagian yang lain dari hidup yang digunakan untuk menanggapi rangsangan sosial, kemudian melakukan reaksi dengan menciptakan tantangan-tantangan yang melahirkan perubahan lahir dan batin.[25]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini dipusatkan pada penelitian kepustakaan. Sumber yang digunakan adalah literatur yang berhubungan dengan kebijakan politik.

---

[24] Robert F. Berkhofer, *A Behavioral Approach to Historical Analysis* (New York: Free Press, 1971), hlm. 67-73.

[25] Arnold J. Toynbee, *A Study of History* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 97-109.

Adapun bentuk pembahasan adalah deskriptif analitis, artinya penulis memaparkan dan menguraikan kejadian dengan berbagai dimensinya melalui pemberian jawaban terhadap pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana, serta menerangkan mengapa peristiwa tersebut terjadi?. Kajian ini dikategorikan sebagai kajian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode historis. Menurut Louis Gottschalk, metode historis merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.[27]

Dalam hal ini penulis melakukan tahap kerja sebagai berikut:

1. Heuristik

   Heuristik atau pengumpulan data sejarah yang sesuai dengan topik yang diteliti. Heuristik merupakan metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini penulis mengambil langkah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu data yang digunakan adalah data berupa: buku, majalah, maupun artikel yang dianggap relevan dengan pembahasan yang penulis lakukan. Dalam pencarian data tersebut penulis mengawalinya dengan mencari data yang berhubungan dengan keadaan pemerintahan Pakistan secara umum dan pada khususnya masa pemerintahan Ayub Khan, dengan memanfaatkan Perpustakaan dan fasilitas internet yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain; Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Adab, Perpustakaan Yayasan Hatta, dan St Kolose Ignatius, sedangkan untuk internet sendiri penulis menggunakan fasilitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

internet di UPT UIN Sunan Kalijaga dan Jasa internet Clarinet. Dari penelusuran ini penulis menemukan beberapa data yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber dalam bentuk buku, majalah, maupun dari internet. Data tersebut kemudian di telaah atau dikritik seperti pada tahap selanjutnya.

2. Verifikasi

Kritik sumber, merupakan langkah kedua dalam metode penelitian ini. Dalam langkah ini penulis melakukan kritik interen dan ekstern atas data yang tertuang dari sumber yang ada dalam berbagai tulisan. Untuk mendapatkan tulisan yang utuh dan logis penulis berusaha melengkapi mengungkapkan kekurangan dan menutupi data yang telah ada dengan jalan mencari data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini pertama-tama penulis melakukan kritik atas keabsahan tentang otentitas (keaslian) sumber, dengan melihat bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan itu, seperti tinta, kertas, dan bahasa. Kritik ini biasanya dinamakan kritik ekstern. Dalam kritik eksteren ini penulis melakukan kritik terhadap salah satu data yang masih menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama, karena ejaannya yang kurang jelas, maka data yang tertuang dalam sumber ini penulis gunakan sebagai reverensi pelengkap bagi data yang lain atau untuk memperkuat data yang ada. Sedangkan untuk kritik intern penulis lakukan dengan menganalisis isi sumber dengan cara mencari bukti-bukti untuk memperkuat sumber yang digunakan berkaitan dengan kebijakan politik Ayub Khan di Pakistan, dalam kritik terhadap sumber ini penulis melakukan kritik mengenai keaslian artikel yang diperoleh dari situs di internet. Kelemahan dari situs yang penulis gunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai sumber ini adalah karena tidak tercantumnya nama. penulis dari setiap artikel yang ada sehingga terkesan data tersebut dibuat-buat dan tidak orang yang bertanggung jawab terhadap isi dari artikel tersebut, sehingga data tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan reverensi dalam penulisan skripsi, namun data yang diperoleh dari situs ini memiliki banyak kesamaan dengan data yang tertuang dalam sumber lain seperti buku, bahkan kadang lebih jelas dan rinci.

3. Interpretasi

   Pada tahap Interpretasi atau penafsiran ini penulis melakukan proses penafsiran dari data yang diperoleh untuk kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan, sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, utuh dan logis. Mengingat fakta yang ada mengenai pemerintahan Pakistan khususnya era Ayub Khan ditemukan secara terpisah, maka penulis melakukan penafsiran guna menghasilkan fakta yang utuh dan menyeluruh.

4. Historiografi

   Untuk tahap terakhir ini, penulis berusaha mengorganisasikan data yang telah dikritik untuk kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan dengan memberikan keterangan penjelasan yang mudah dipahami. Setiap pembahasan dalam proses penyusunannya ditempuh melalui deskripsi dan analisis dengan selalu memperhatiakn kronologi dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, sehingga data yang tersaji dalam bentuk utuh dan berkesinambungan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian dalam bentuk skripsi ini mempunyai tiga bagian: pengantar, hasil penelitian, dan lampiran. Hasil penelitian disajikan dalam lima

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bab yang dituangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya Bagian pertama ialah bab I disajikan pada bagian pendahuluan sebagaimana telah dibahas, di dalamnya menguraikan beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran global tentang rencana penelitian, uraian secara lebih rincinya dipaparkan dalam bab-bab selanjutnya.

. Pada II kedua dibahas mengenai gambaran umum Pakistan sebagai negara baru yang memulai segala sesuatunya dari awal. Di dalam pembahasannya diawali dengan latar belakang kemerdekaan Pakistan, kemudian dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat Pakistan dalam kegiatan politik. Sub bab ketiganya adalah membahas tentang pemerintahan Parlementer yang diterapkan Pakistan di awal kemerdekaan, diuraikan pula tentang beberapa usaha para Gubernur Jendral dan Perdana Menterinya dalam membentuk suatu negara. Pada butir keempat pembahasan beralih kemasalah penyusunan konstitusi yang baru terbentuk pada tahuan 1956, kemudian dilanjutkan pada bagian terakhir yaitu mengenai diterapkannya hukum darurat perang di bawah kekuasaan Iskandar Mirza. Rangkaian permasalahan ini penting untuk dibahas karena kondisi-kondisi tersebut yang akan menjadi tolak ukur Ayub Khan dalam menerapkan kebijakan politiknya nanti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada bab III dibahas tentang biografi Ayub Khan, di dalamnya diuraiakan tentang bagaimana kehidupan seorang Ayub Khan sebelum dia menjabat sebagai Presiden dan penguasa darurat perang. Pada bab ini dimulai dengan memaparkan tentang riwayat hidup Ayub Khan dari sejak sekolah dasar sampai keperguruan tinggi, pada bagian kedua yaitu tentang tindakan kudeta militer yang dilakukannya

terhadap Iskandar Mirza, kemudian bagian terakhirnya membahas tentang kemunduran kekuasaannya sebagai Presiden Pakistan. Bab tentang biografi ini penting untuk dibahas karena dari sini diharapkan dapat diketahui bagaimana individu seorang pemimpin dan dapat pula diketahui faktor-faktor individu yang mempengaruhinya dalam memutuskan setiap kebijakan.

Bab IV merupakan fokus dari penelitian yaitu mengenai kebijakan politik yang dijalankan oleh Ayub Khan. Pembahasan awalnya dimulai dari hukum darurat perang yang diberlakukan Ayub Khan 1958-1962, samapi akhirnya dia tampil sebagai penguasa baru di Pakistan. Sub bab kedua menguraikan tentang pokok-pokok kebijakan politik yang dijalankan oleh Ayub Khan, di antaranya: pelaksanaan basis demokrasi, yang merupakan pengganti dari sistem pemerintahan Parlemen yang sebelumnya diterapkan di Pakistan, kebijakan lainnya yaitu mengenai perubahan bentuk konstitusi negara yang disahkan pada tahun 1962, walaupun kemudian disusul dengan amandemennya, dilanjutkan dengan kebijakan bilateral yang dilakukan antara Pakistan dan India dalam bentuk perjanjian Tashkent. Pada bagian terakhirnya diuraikan tentang bagaimana respon masyarakat Pakistan terhadap kebijakan politik Ayub Khan, yang ternyata telah memunculkan berbagai protes terhadapnya. Rangkain pada bab ini merupakan pokok dari penelitian sehingga dari uraiannya dapat diambil kesimpulan mengenai usaha-usaha Ayub Khan dalam menerapkan kebijakkannya.

Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan akhir dari seluruh uraian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dituangkan, juga dilengkapi dengan saran atau himbauan yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

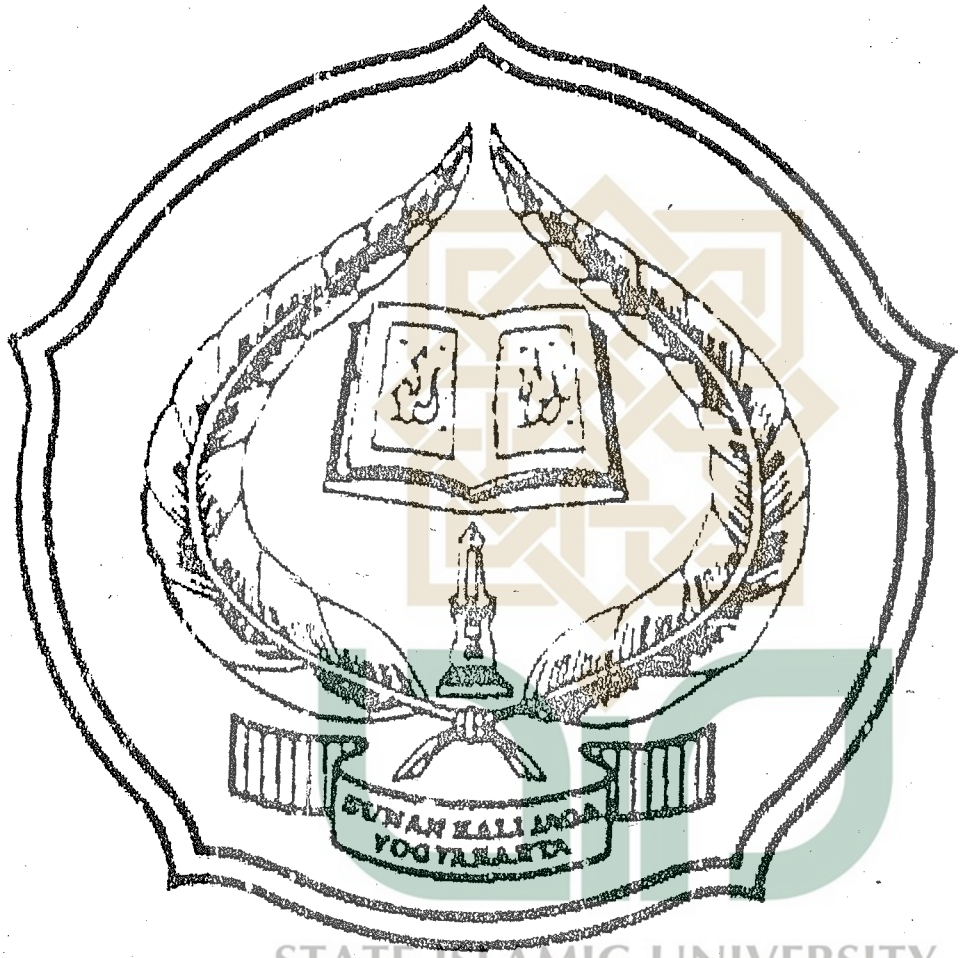

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan tentang kebijakan politik yang dijalankan oleh Ayub Khan di Pakistan, maka beberapa kesimpulan dapat ditarik disini. Kemerdekaan Pakistan tidak datang dengan sendirinya perjalanan panjang tokoh-tokoh Muslim yang mendiami anak benua India ini menjadi sebuah pondasi awal lahirnya Republik Islam Pakistan. Setelah sembilan tahun lamanya konstitusi Pakistan bary terbentuk, salah satu penyebab lamanya pembentukan konstitusi tersebut adalah karena adanya perbedaan pendapat dan seringnya pergantian posisi Perdana Mentri dalam tubuh pemerintahan.

Terbentuknya konstitusi bukan berarti keadaan Negara menjadi stabil dan kokoh. Di tahun 1958, politik di Pakistan makin tidak terkendali, Iskandar Mirza sebagai Presiden Pakistan segera memberlakukan hokum darurat perang sebagai cara yang dianggapnya bias meredakan kekacauan politik. Namun karena tindakannya pula yang membawanya dalam kegagalan, dia umpamakan seperti menggali sungai atau parit yang mengundang buaya untuk dating. Ayub Khan yang mendapat tugas sebagai pelaksana hokum darurat perang segera melakukan kudeta terhadap Iskandar Mirza, karena Ayub perpendapat Mirzalah yang harus bertanggung jawab terhadap semua kekacauan yang terjadi di Pakistan.

Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh Ayub Khan adalah pelaksanaan *Basic Democracy*, alasan Ayub menerapkan kebijakan ini adalah karena dia menganggap sistem pemerintahan model parlementer ternyata tidak cocok bila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam dua bagian. Tingginya angka buta huruf yang berada di pedesaan pun turut menjadi salah sau alasannya. Kebijakan politik lainnya yaitu mengenai perubahan konstitusi. Perubahan yang dilakukan Ayub adalah mengenai nama Negara yang sebelumnya Republik Islam Pakistan diubah menjadi Republik Pakistan. Disinyalir perubahan tesebut merupakan ide dari golongan modernis yang ingin membatasi peranan golongan tradisionalis, namun akhirnya Ayub pun lebih condong kepada golongan terlihat dalam tindakan beikutnya yaitu dibentuknya Amandemen 1962. Selain dua kebijakan di atas, kebijakan lainnya erat kaitannya dengan masalah perjanjian damai yang dilakukan antara Pakistan dan India, karena masalah perbatasan. Latar belakang dilakukannya perjanjian tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah lama lama yang kadang meletus dalam wujud peperangan.

Secara keseluruhan kebijakan politik Ayub Khan dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, namun imbas itu tidak menimbulkan efek yang baik bagi penduduknya. Munculnya rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa menjadi salah satu buktinya. Demonstrasi di wilayah Timur berujung pada tuntutan otonomi daerah dengan mengusung program *six point* yang dipelopori oleh Mujibur Rahman, atau lebih dikenal dengan *Bangga bandhu* (Sahabat Bangla). Kerusuhan yang terjadi di wilayah Timur ini, menurut penulis merupakan sebuah rangkaian awal terpisahnya wilayah Timur menjadi Negara yang merdeka yaitu Bangladesh, dan ternyata hal tersebut diilhami dari peristiwa Resolusi Lahore 1940. Semua rangkain demonstrasi yang dilancarkan oleh maahasiswa telah menguras tenaga dan pikiran Ayub Khan, kegigihannya untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mempertahankan kekuasaan telah mengalami kekalahan dan memaksanya untuk mundur dari jabatan.

B. Saran-saran

Untuk para peneliti yang akan datang, apabila dijumpai adanya kesamaan tema dengan yang penulis angkat, maka ada beberapa hal yang perlu di perhatikan diantaranya adalah:

1. Adanya referensi frimer yang tentunya berkaitan dengan tema atau judul yang akan di angkat, karena referensi frimer tersebut digunakan sebagai bahan pembanding baik persamaan dan perbedaannya.
2. Pada umumnya tema yang berkaitan dengan sejarah klasik maupun kontemporer, yang mana ruang lingkup kejadiannya terjadi di luar Indonesia biasanya akan dijumpai kesulitan dalam mengumpulkan data. Data yang tersedia kebanyakan berbahasa asing, maka yang perlu ditekankan disini adalah adanya keahlian seorang penulis dalam penterjemahkan berbagai referensi yang berbahas asing tersebut.
3. Satu hal lagi yang perlu di perhatiakan apabila peneliti memiliki kesamaan tema penelitian dengan penulis, yaitu untuk lebih memahami tentang istilah-istilah politik dan pemerintahan, karena dalam hal ini penulis tidak hanya menguraiakan rangkaian peristiwa akan tetapi dituntut agar mampu menjelaskan istilah-istilah politik dan pemerintahan dalam pembahasannya nanti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

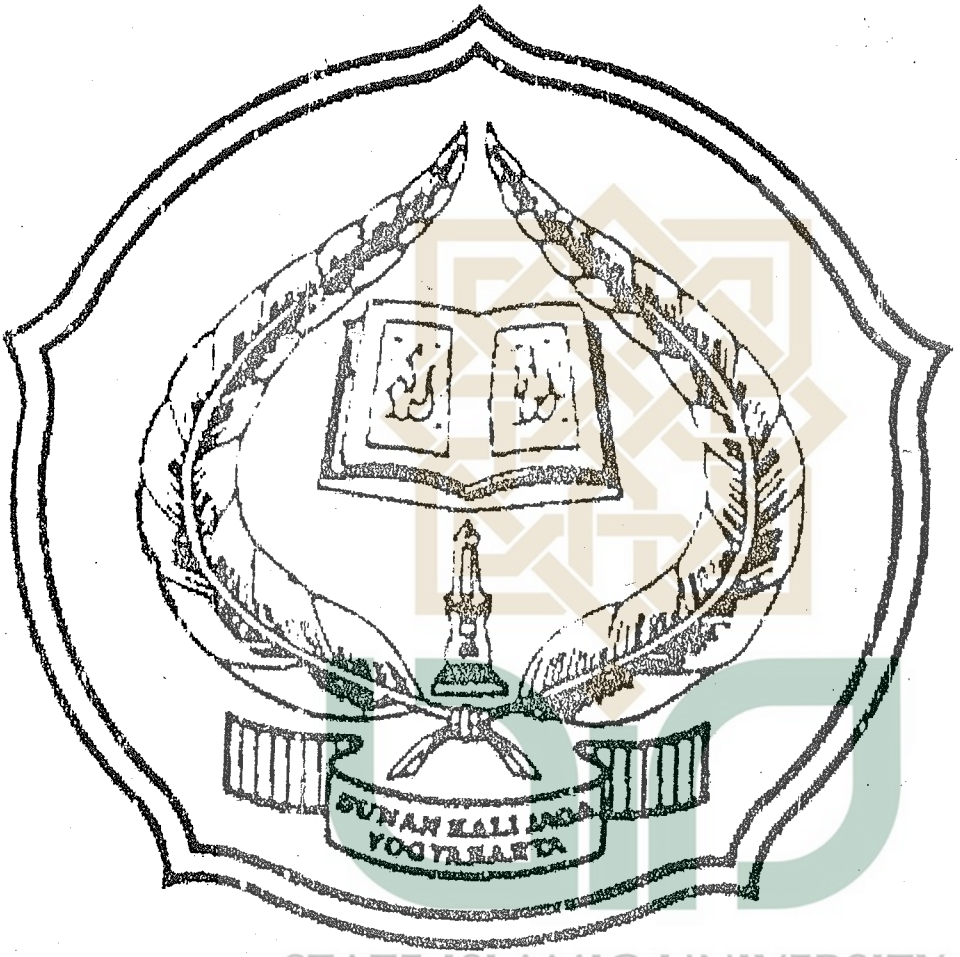

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Majalah

Ahmad, Aziz. *Islamic Modernisme in India and Pakistan 1957-1964*. London: Oxford University Press, 1967.

Ahmad, Mustaq. *Government and Politics in Pakistan*. Karachi: Pakistan Publishing, 1959.

Ali, K. *History of India, Pakistan, and Bangladesh*. Dhaka: Ali Publication, 1980.

Ali Sodiqin. "Peradaban Islam di Asia Selatan dan Imperialisme Barat", dalam Siti Maryam dkk. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2002.

Ali, Tariq. *Can Pakistan Survive: The Death of A State*. London: Verso, 1983.

Amal Hamzah. *Pakistan: Sebuah Negara Islam Muda*. Jakarta: Djembatan, 1953.

Berkhofer, Robert F.Jr., *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: Free Press, 1971.

Callared, Keith " Pakistan", dalam G. McTurhan Kahim *Major Government of Asia*. Itacha: Cornell University Press, 1961.

Campbell, Robert D., *Pakistan: Emerging Democracy*. New Jersey: D. Van Nostrand INC., 1963.

Esposito, Jhon L (ed). "Pakistan: Pencarian Identitas Islam", dalam Jhon Obert Voll. *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang*. Terj. Wardah Hafidz. Yogyakarta: PLP2M, 1985.

_____. "Pakistan: Republik Islam Beraneka Wajah", dalam *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1984.

Faruki, Kemal A., "Pakistan: Islamic Government and Society", dalam Jhon Esposito. *Islam in Asia Religion, Politics, and Society*. London: Oxford University Press, 1987.

Grolier Noble dan Bernes. *New American Encyclopedia jilid 13*. American: Grolier Incoporated, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Grunebaum G. E. Von and Aziz Ahmad. *Muslim Self Statement in India and Pakistan 1857-1968*. Wiesbaden: Otto Harrosswitz, 1970.

Haksa Wirasutisna dan Tatang Sastrawiria. *Ensiklopedi Politik*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kem P&k., 1955.

Harun Nasution dan Azumardi Azra. *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

_____. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Husain, Ashaf. "Pakistan", dalam Raphael Israeli. *The Crescent in the East: Islam in Asia Major*. London: Curzon Press, 1989.

Ini Kencana Syafi'i. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Jalal, Ayesha. *The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan Political Economi of Defence*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Muhdud, Munir D., "Pakistan: The Dream of Islamic State", dalam Carlo Caldarola. *Religion and Societies Asia in the Midle East*. Delhi: Moutan Publisher, 1986.

Montimer, Edward. *Islam dan Kekuasaani*. Terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1984.

Muhaimin. *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritis Pembaharuan Pendidkan Islam*. Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999.

Patel, Rashida. *Islamization of Law in Pakistan*. Karachi: Faiz Publisher, 1986.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Rahman, Fazlur. "Some Islamic Issues in Ayub Khan Era", dalam Donald P Little (ed). *Essay on Islamic Civilization*. Leiden: E. J. Brid, 1976.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sejarah Dalam Metodelogi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Shahani, M. L., "Religion and Government A Pakistani Experince", dalam *Al-Munshir*. Vol 44 no.1 tahun 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Symonds, Richard. *Pembinaan Pakistan.* Terj. S. R. Batutah. Jakarta: Balai Pustaka, 1951.

Taufik Adnan Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman.* Bandung: Mizan, 1989.

Tim Penyusun. *Ensiklopedia Indonesia Jilid 1&4.* Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989.

_____. *Ensiklopedia Indonesia Jilid 12.* Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

_____. *Ensiklopedia Negara dan Bangsa.* Jakarta: Gholier International, 1988.

Toynbee, Arnold J. *A Study of History.* London: Oxford University Press, 1972.

Yusril Ihza Mahendra. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at Islami (Pakistan).* Jakarta: Paramadina, 1999.

B. Internet

"Ali Borga Become Prime Minister 1953", dalam http:// www. Storyofpakistan.com.

"Ayub Khan", dalam http: //en. Wikipedia.org/ wiki/ Ayub_khan.

'Ayub Khan Era", dalam http: //www. Country-data.com.

"Ayub Khan, Muhammad", dalam http: //www. Encyclopedia.com/html.

"Ayub Khan Foreign and Indus Water Treatry 1960", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Ayub Khan Foreign Policy and the War With India", dalam http: //www. Country_data.com.

"Basic democracies", dalam http: //www. Banglapedia. Search.com.

"Biografi Ayub Khan, dalam http: //www. Asiasource.org/ society/AK.

"Choudhry Muhammad Ali Become Prime Minister 1955-1956", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Constitution 1962", dalam http: //www. Storyofpakistan.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Ever After The War", dalam http: //www. Encarte. msn.com/ encyclopedia/ Pakistan.html.

"Farakka Dam", dalam http:// www. Transbouderywaters.orst.edu /projects/ casestudies /gangga.html.

"Ghulam Muhammad Become Governor General 1951-1953", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Huseyn Shaheed Suhrawardy Become Prime Minister 1956-1957", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Ibrahim Ismail Chundrigar Become Prime Minister 1957", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Iskandar Mirza", dalam http: //www. Storyofpakistan.com/person

"Iskandar Mirza Become Governor General 1955", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Iskandar Mirza Become Presiden 1956", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Khan (Field Marshal) Muhammad Ayub", dalam http: //www. Banglapedia. Search.com.

"Khawaza Najimuddin Become Prime Minister 1951-1953", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Khawaza Najimuddin Become Governor General 1948-1951", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"Liaquat Ali Khan Become Prime Minister 1951", dalam http: //www. Storyofpakistan.com

"Malik Feroz Khan Noon Become Prime Minister 1957", dalam http: //story ofpakistan.com

"Martial Law Under General Ayub Khan 1958-1962", dalam http: //www. Storyofpakistan.com

"Pakistan Ayub Khan 1958-1969", dalam http: //www. Photius.com/ Country/ Pakistan/ Government

"Pakistan Table Content", dalam http: //www. Country-studies.us/ Pakistan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Six Point Movement", dalam http: //en. Wikipedia.org/wiki

"Tashkent Declaration 1966", dalam http: //www. Encarte.com/ encyclopedia/ Pakistan. Html

"The Constitusi of 1956", dalam http: //www. Storyofpakistan.com.

"War In Kashmir", dalam http: //en. Wikipedia.ak/ wiki/ Muhammad_Ayub_Khan

"The Decline of Leadershif", dalam http: //en. Wikipwdia.org/wiki/Ayub Khan

"The Resign of Ayub Khan", dalam http: //en. Wikipedia.org/wiki/ Ayub Khan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA